

iMAP State of Internet Censorship Report 2022

COUNTRY: INDONESIA
(BAHASA INDONESIA)

By Khairil Zhafri (EngageMedia), Pradipa P. Rasidi (Engage Media), Debby Kristin (EngageMedia),
Siti Nurliza Samsudin (Sinar Project) and Kelly Koh (Sinar Project)

Published/Produced by Sinar Project
team@sinarproject.org
<https://sinarproject.org>

© Sinar Project 2022
[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Tentang iMAP

Internet Monitoring Action Project (iMAP) bertujuan untuk membangun jaringan regional dan dalam negeri yang memantau gangguan jaringan dan pembatasan kebebasan berekspresi secara daring di 9 negara: Myanmar, Kamboja, Hong Kong, India, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Sinar Project saat ini bekerja sama dengan mitra hak digital nasional di 9 negara tersebut. Proyek ini dilakukan melalui sistem deteksi dan pelaporan Open Observatory Network Interference (OONI) yang melibatkan pemeliharaan daftar pengujian dan pengukuran.

Informasi selengkapnya tersedia di: imap.sinarproject.org. Silakan hubungi team@sinarproject.org jika ada pertanyaan dan saran tentang laporan ini.

Tentang Sinar Project

Proyek Sinar adalah inisiatif teknologi sipil yang menggunakan teknologi terbuka, data terbuka, dan analisis kebijakan untuk menyediakan informasi penting tersedia bagi publik secara sistematis, dan lebih mudah diakses oleh warga Malaysia. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dan mendorong partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam urusan publik bangsa dengan cara membuat Parlemen dan Pemerintah Malaysia lebih terbuka, transparan, dan akuntabel. Informasi lebih lanjut kunjungi: <https://sinarproject.org>.

Tentang EngageMedia

EngageMedia adalah organisasi nirlaba yang mempromosikan hak digital, teknologi terbuka dan aman, dan dokumenter masalah sosial. Dengan menggabungkan video, teknologi, pengetahuan, dan jaringan, kami mendukung para pembuat perubahan Asia-Pasifik dan global yang mengadvokasi hak asasi manusia, demokrasi, dan lingkungan. Dengan menjalin kerja sama dengan beragam jaringan dan komunitas, kami membela dan memajukan hak digital. Pelajari lebih lanjut tentang EngageMedia di <https://engagemedia.org>.

Daftar Isi

Tentang iMAP	2
Tentang Sinar Project	2
Tentang EngageMedia	2
Daftar Isi	3
Temuan Utama	3
Latar Belakang Negara	4
Lanskap jaringan dan penetrasi internet	4
Konteks politik	5
Lingkungan hukum	7
Kebebasan berekspresi	7
Pasal 27 dan 45 Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) No 11 Tahun 2008	7
UU tentang Organisasi Kemasyarakatan tahun 2023	7
Kebebasan pers	8
UU Pers Nomor 40 Tahun 1999	8
Akses terhadap Informasi	8
UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008	8
UU Intelijen Negara Nomor 17 Tahun 2011	8
Privasi	9
UU Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022	9
Hak untuk Dilupakan (Amandemen UU ITE tahun 2016)	9
Sensor dan pengawasan	10
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	10
Pasal 40 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Undang-Undang No 11 tahun 2008	10
Penanganan Situs Internet Yang Memuat Konten Negatif Peraturan Menteri No 19 tahun 2014	10
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat	10
Kasus sensor internet	11
TrustPositif oleh Kominfo	11
Permintaan untuk menutup aplikasi LGBTQ+	12
"Tipuan" menghapus permintaan	12
Sensor internet ekstrateritorial	12
Penodaan agama dan sensor internet	13
Sensor internet dan Anti-Pancasila	13
Mengkaji sensor internet di Indonesia	13
Temuan	13
Situs Web Diblokir	13
Pornografi	14
Perjudian	16
Fitur anonimisasi dan pengelakan	17
LGBTQ+	18

Media Berita	19
Agama	20
Pakaian Provokatif	21
Isu Hak Asasi Manusia	22
Berbagi file dan media	23
Perpesanan instan dan alat pengeluaran	24
Pengakuan keterbatasan	24
Kesimpulan	26
Lampiran ID-1: ISP yang Diperiksa	27
Lampiran I: Glosarium	28
Lampiran II: Metodologi	29
Data	29
Cakupan	29
Bagaimana pengukuran jaringan dikumpulkan?	30
Bagaimana pengukuran jaringan dianalisis?	31
Kode negara	31
Nomor Sistem Otonom (ASN)	31
Tanggal dan waktu pengukuran	31
Kategori	31
Alamat IP dan informasi lainnya	33
Pengukuran jaringan	33
Dikonfirmasi vs Heuristik	35

Temuan Utama

- Pada bulan Juli 2014, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif mulai berlaku sebagai bagian dari program regulator Internet Sehat dan Aman (INSAN). Undang-undang mengamankan ISP untuk memblokir setiap konten internet yang dianggap mengandung unsur "negatif" seperti pornografi, hoaks, atau konflik SARA.
- Per September 2022, Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia (Kominfo) telah memblokir lebih dari 1.000.000 situs web melalui TrustPositif, sebuah aplikasi penyaring yang telah beroperasi sejak tahun 2010 sesuai Peraturan Kementerian No 19 tahun 2014.
- Data pengukuran jaringan OONI yang dikumpulkan dari 62 ISP mengonfirmasi pemblokiran di Indonesia terhadap 414 situs web sejak 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022. Pemblokiran tersebut terutama dilakukan melalui DNS hijacking (95% dari situs web yang diukur).
- Sebagian dari situs web yang diblokir terkait dengan pornografi (20,3%), perjudian (14,7%), alat penganoniman dan pengelakan (8,7%), dan LGBTQ+ (6%). Situs lain yang diblokir yang ditemukan dalam data pengukuran meliputi kategori berikut: Pakaian Provokatif (4,6%); Media Berita (4,6%); Agama (4,4%); Permainan (3,4%); Isu Hak Asasi Manusia (4,6%); dan Berbagai media (3,1%).
- Tidak ada penyensoran yang berarti yang dideteksi pada aplikasi pemesanan instan dan alat pengelabuan yang dites dengan OONI.

Latar Belakang Negara

Lanskap jaringan dan penetrasi internet

Penduduk: 270,2 juta orang

Tingkat penetrasi internet: 69,8% pada 2020, 73,70% pada 2019/2020 vs 77,02% pada 2021/2022

Broadband seluler: 355 juta langganan – terbesar ketiga di dunia setelah India dan China

Broadband jalur tetap: 11,7 juta langganan

ISP seluler utama: Telkomsel (169,5 juta pengguna), Indosat (60,3 juta), dan XL Axiata (57,89 juta) – bersama – sama mengendalikan lebih dari 80% pasar internet seluler

ISP jalur tetap utama: Indihome (67,5%), First Media (3,88%), MNC (2,88%). Ada juga persentase pengguna yang tinggi menggunakan varietas ISP regional (12,8%)

Perusahaan terkait pemerintah Telkom Indonesia mengoperasikan layanan broadband jalur tetap seperti Indihome, Astinet, dan DigiConnect, serta mempunyai kepemilikan utama di operator seluler Telkomsel. Perusahaan milik negara Singapura Singtel juga mempunyai kepemilikan signifikan atas Telkomsel. Usaha patungan antara perusahaan terkait pemerintah

Qatar Ooredoo dan CK Hutchison yang berbasis di Hong Kong memiliki kepemilikan mayoritas di Indosat, sementara XL adalah anak perusahaan dari Axiata, sebuah perusahaan terkait pemerintah Malaysia.

Di provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua di Indonesia bagian timur, Telkomsel memiliki tower base transceiver station (BTS) terbanyak yang membuat perusahaan ini menjadi pemain dominan di wilayah tersebut. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tahun 2019 dengan perwakilan Telkomsel dan pejabat pemerintah di tiga daerah di Maluku, konektivitas di provinsi ini bergantung pada jaringan Telkomsel untuk pengguna perorangan dan jaringan yang disubsidi pemerintah yang bekerja sama dengan ISP lokal atau Telkom Indonesia. Telkom Indonesia tetap menjadi pemimpin pasar dalam lanskap jaringan Indonesia sejak didirikan.

Konteks politik

Wacana hipernasionalis telah berkembang di Indonesia sepanjang dekade lalu sejak terpilihnya Presiden Jokowi (Joko Widodo) pada 2014, khususnya setelah vonis atas penistaan agama gubernur Jakarta yang beretnis Tionghoa Kristen, Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama sewaktu kampanye pemilihan kembali dirinya pada 2017. Sebagai cara untuk menekan ideologi Islam politis, dan respons terhadap serangan teroris dan ekstrimis keras yang mencekam negara ini dalam ketakutan sejak reformasi demokrasinya pada 1998, pemerintahan Jokowi semakin mendukung gagasan Indonesia sebagai lembaga politik dengan beraneka ragam budaya yang dipersatukan bersama baik oleh penghormatan akan rasa keunikan yang membatasi tokenisme budaya maupun oleh kekuasaan pemerintah yang kuat namun berbaik hati.

Wacana hipernasionalis ini berimplikasi kuat pada sensor internet. Dalam masalah agama, kebijakan Indonesia berjalan bersama dengan apa yang oleh beberapa pengamat sebut sebagai “nasionalisme yang saleh”, sebuah model negara-bangsa yang menerima ortodoksi pluralis tetapi monoteistik. Sementara ekstremisme kekerasan ditindak dan dicegah secara luas melalui undang-undang, ajaran agama heterodoks yang melawan ortodoksi sama-sama disensor dan bahkan dihukum karena salah secara moral. Pemenuhan kebenaran moral ini memerlukan batasan serupa terhadap komunitas LGBTQ+ dan minoritas seksual lainnya. Dengan kecenderungan nasionalistik, minoritas seksual dikutuk karena bertentangan dengan “budaya ketimuran” dan dituduh sebagai impor gaya hidup yang sarat moral dari Barat.

Kedua kasus tersebut bertumpu pada prinsip ideologi negara Indonesia, Pancasila, yang mengalami kebangkitan kritis dalam wacana politik melalui sosialisasi aktif pemerintah di kalangan rakyat. Ambisi pemerintahan Jokowi untuk membangun infrastruktur jaringan di seluruh negeri yang mencapai Indonesia bagian timur—sering digambarkan sebagai “terbelakang”—semakin memantapkan imajinasi tentang kepulauan yang luas yang disatukan di bawah pemerintah pusat yang baik hati. Negara Kesatuan Republik Indonesia, nama resmi Indonesia, telah sering digaungkan untuk menghasilkan imajinasi negara kesatuan yang kuat ini. Hal ini terlihat jelas dalam pemerintahan Papua dan Papua Barat, dua provinsi dengan gerakan pro-kemerdekaan yang terus-menerus menghadapi pengerahan militer. Slogan “menjaga NKRI” telah digaungkan di daerah untuk memunculkan gagasan negara penyelamat yang memupuk rakyatnya yang kurang berkembang, menggambarkan pembangunan infrastruktur administrasi Jokowi dan pelambatan serta pemadaman internet di daerah.

Penyelenggara Sistem Elektronik yang akan dibahas di bawah ini didukung oleh narasi nasionalis tentang pentingnya menjaga “kedaulatan digital Indonesia”.

Wacana hipernasionalis dianut oleh politisi baik dari partai berkuasa maupun partai oposisi. Bahkan, seperti yang dikatakan beberapa pengamat, wacana ini—serta Islam politik yang tampaknya menentang mereka—mengaburkan fakta bahwa oposisi politik tidak ada di Indonesia. Aktor yang terlibat baik di partai penguasa maupun partai oposisi adalah aktor yang sama dalam jaringan elit oligarkis. Pada periode keduanya, Jokowi menunjuk Prabowo Subianto yang pernah menjadi rival elektoralnya pada pemilihan presiden 2014 dan 2019.

Layaknya negara-negara lain di Asia Tenggara, situasi penguasaan informasi di Indonesia diwarnai oleh industri troll yang juga bertautan dengan industri influencer negara tersebut. Lanskap politik Indonesia yang oligarkis membuat troll dimobilisasi tidak hanya untuk melindungi kepentingan pemerintahan Jokowi, tetapi juga untuk bertarung dalam kontes pemilihan nasional dan lokal, serta untuk melindungi kepentingan perusahaan—seperti yang terjadi dalam kampanye media sosial yang membela pengembang lahan seperti PT Tirta Wahana Bali International milik Tommy Winata soal proyek reklamasi lahan Bali dan unicorn teknologi yang berlawanan dengan masalah tenaga kerja seperti Gojek. Kepentingan bisnis dan politik cenderung tumpang tindih, mengingat parlemen negara ini terdiri dari 55% pengusaha dan memiliki menteri seperti Nadiem Makarim yang mendirikan Gojek dan Luhut Binsar Pandjaitan yang memegang saham di berbagai perusahaan pertambangan.

Pembelaan hak asasi selalu menjadi tantangan di negara ini. Selain terjadinya sejumlah penangkapan, pengintaian dan serangan troll (memprovokasi seseorang di dunia maya) dan dox (mengungkap identitas atau informasi rahasia seseorang di dunia maya), kasus-kasus pembobolan data di publik atau sektor swasta telah terjadi sembilan kali di 2022 saja, bahkan lebih banyak di tahun-tahun sebelumnya. Kurangnya perlindungan data memperburuk praktik troll politik, sementara Undang-Undang terbaru tentang Perlindungan Data Pribadi khususnya mengizinkan lebih banyak pelanggaran, sebagaimana yang akan dibahas di bawah ini. Lebih parah lagi, beberapa aktivis hak asasi mendukung penghapusan organisasi-organisasi yang dianggap membahayakan keamanan nasional, dan beberapa aktivis lainnya yang sekarang bekerja untuk pemerintah telah ikut-ikutan membela penyensoran yang pemerintah lakukan dalam masyarakat. Sejumlah akademisi menuduh para aktivis ini membangun jaringan perlindungan dengan elit politik untuk mengamankan kepentingan ekonomi mereka.

Lingkungan hukum

Kebebasan berekspresi

Pasal 27 dan 45 Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) No 11 Tahun 2008

Pasal 27 dan 45 UU ITE Tahun 2008 telah digunakan untuk menuntut orang yang “dengan sengaja dan tanpa hak” mendistribusikan, mengirimkan, atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang berisi (i) materi melawan kepatutan, (ii) materi perjudian, (iii) materi yang mengandung fitnah, dan (iv) materi yang mengandung pemerasan atau ancaman. Berdasarkan Pasal 45, setiap orang yang memenuhi salah satu unsur tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1

miliar. Amandemen Pasal 45 tahun 2016 mengurangi sanksi pidana untuk kejahatan berdasarkan Pasal 27(iii) tentang pencemaran nama baik menjadi hukuman penjara paling lama 4 tahun dan denda 750 juta rupiah, selain memperjelas bahwa ketentuan untuk penyebaran materi fitnah merupakan kejahatan berdasarkan pengaduan.

UU tentang Organisasi Kemasyarakatan tahun 2023

UU tentang Organisasi Kemasyarakatan tahun 2023 membuat organisasi masyarakat sipil (OMS) tunduk pada peningkatan kontrol birokratis dan diskriminatif, yang mengizinkan pemerintah menyaring semua OMS di negara ini. Undang-undang mengatur OMS atas berbagai larangan dan kewajiban untuk dapat memperoleh izin untuk beroperasi di dalam negeri, termasuk melarang OMS menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara Pancasila, yang menganut lima prinsip nasionalisme Indonesia; internasionalisme; persetujuan atau demokrasi; kemakmuran sosial; dan Ketuhanan yang Maha Esa, sehingga secara langsung melanggar hak kebebasan beragama organisasi.

Undang-undang memberikan batasan yang ketat pada jalannya OMS yang didanai asing di dalam negeri. Pasal 52 undang-undang tersebut melarang OMS yang didirikan oleh warga negara asing untuk melakukan kegiatan intelijen atau politik, atau kegiatan apa pun yang dapat “mengganggu kestabilan dan keutuhan” Indonesia atau yang dapat “mengganggu hubungan diplomatik”.

Pasal 52(g) melarang OMS “menggalang dana dari masyarakat Indonesia”; dan (h) “menggunakan sarana dan prasarana instansi atau lembaga pemerintahan”. Pelanggaran terhadap ketentuan represif tersebut dapat mengakibatkan pembubaran OMS.

Undang-undang tersebut telah digunakan untuk mengancam pembubaran serikat buruh pada tahun 2014 dan membubarkan organisasi Islam Hizbut Tahrir Indonesia pada tahun 2017 dengan tuduhan “mempromosikan pembentukan kekhalifahan”.

Kebebasan pers

UU Pers Nomor 40 Tahun 1999

Pasal 4 UU Pers tahun 1999 menjamin kebebasan pers sebagai hak asasi setiap warga negara. Undang-undang tersebut memuat banyak ketentuan positif yang berfungsi untuk melindungi kebebasan pers. 4(2) menetapkan bahwa pers nasional tidak boleh dikenakan sensor atau pembatasan siaran, sedangkan 4(3) memberikan hak kepada pers nasional untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi secara bebas untuk menjamin kebebasan pers .

Namun UU Pers juga memuat sejumlah pembatasan yang berpotensi berbahaya pada konten yang mungkin mengizinkan kecaman. Pasal 5 UU ini membatasi pers nasional untuk mereportasekan kejadian dan opini yang berkaitan dengan norma keagamaan dan moral masyarakat, sesuai dengan asas praduga tak bersalah. Hal ini melarang bentuk-bentuk ekspresi seperti kritik yang sah terhadap badan keagamaan, yang bertentangan dengan ketentuan di Pasal 6 yang menyatakan bahwa pers nasional melakukan perannya dalam memenuhi hak publik untuk mengetahui, dan memberikan kritik, koreksi, serta saran atas keprihatinan masyarakat.

Akses terhadap Informasi

UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008

UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor tahun 2008 menjamin kebebasan informasi sebagai hak Pemohon Informasi Publik, dibatasi hanya untuk warga negara atau badan hukum Indonesia. Berdasarkan Pasal 22 dan 35, permintaan informasi mensyaratkan bahwa nama, alamat dan alasan permintaan harus diberikan oleh pemohon. Secara bermasalah, undang-undang akan memungkinkan adanya sanitasi dokumen yang diminta, memungkinkan redaksi atau "penghitaman" informasi terbatas sembari memberikan akses ke seluruh dokumen.

Berdasarkan undang-undang, sanksi pidana diberikan kepada pejabat publik yang terbukti sengaja mengabaikan kewajibannya untuk menyediakan dan mengumumkan informasi publik. Namun, Pasal 51 juga menuliskan bahwa ancaman hukuman berat berlaku bagi setiap orang yang terbukti melakukan penggunaan informasi publik dengan sengaja "secara melawan hukum", dengan ancaman pidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak lima juta rupiah. Apa yang dianggap "melawan hukum" didefinisikan secara samar-samar, dan membiarkan ketentuan tersebut terbuka untuk disalahgunakan.

Meskipun terdapat ketentuan untuk menjamin hak atas kebebasan informasi, implementasinya tetap cacat: Sebuah studi tahun 2012 mengungkapkan inefisiensi struktural dalam cara permintaan informasi ditangani oleh badan publik di Indonesia. Hanya 46 persen dari 224 permintaan informasi yang telah dikabulkan, dan peserta sering melaporkan bahwa permintaan mereka telah diabaikan atau hilang oleh otoritas publik.

UU Intelijen Negara Nomor 17 Tahun 2011

Undang-undang memberikan wewenang kepada Badan Intelijen Negara (BIN) untuk melakukan upaya pengumpulan intelijen secara luas terhadap "pihak lawan" yang dianggap "mengancam kepentingan dan keamanan nasional". Selain itu, Pasal 31 undang-undang tersebut memberi wewenang kepada BIN untuk mencegat komunikasi tanpa perlu persetujuan pengadilan terlebih dahulu. Bahasa yang luas dan ambigu di balik "pihak lawan" dan "kepentingan dan keamanan nasional" membuka undang-undang tersebut untuk kriminalisasi.

Pasal 25 (4) dan 25 (5) menyatakan bahwa "rahasia intelijen" yang digunakan BIN sebagai informasi tertutup dan tidak dapat diungkapkan kecuali untuk kepentingan persidangan. Pasal 44 menghukum orang yang menyebarkan "rahasia intelijen" dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, dan denda paling banyak 500 juta rupiah, undang-undang tidak mengizinkan adanya transparansi terhadap "rahasia intelijen" dan operasi BIN di masa lalu yang mendasarinya.

Privasi

UU Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022

Pasal 28g(1) Undang Undang Dasar Negara Indonesia mengatur hak atas "perlindungan" dan hak untuk "rasa aman". Indonesia tidak memiliki undang-undang khusus yang mengatur hak atas privasi hingga September 2022 dengan disahkannya UU Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022. Undang-undang tersebut menyediakan kerangka hukum yang komprehensif

yang mencakup berbagai kategori data pribadi, hak pribadi subjek data, kewajiban pengontrol data pribadi, pelanggaran data pribadi, otoritas perlindungan data pribadi, dan penggunaan data pribadi yang dilarang.

Sebagian besar layanan keuangan Indonesia diatur oleh kerangka peraturan lain di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan data. Namun, tidak semua layanan keuangan masuk dalam lingkup OJK, termasuk layanan pinjaman online tanpa izin. UU Perlindungan Data Pribadi tahun 2022 berlaku tidak hanya bagi entitas yang berkedudukan di Indonesia tetapi juga bagi mereka yang mengolah data pribadi warga negara Indonesia atau yang memiliki akibat hukum di Indonesia. Namun, ini tidak berlaku untuk pemrosesan data pribadi yang berkaitan dengan keamanan nasional, penegakan hukum, dan kepentingan publik oleh negara.

Hak untuk Dilupakan (Amandemen UU ITE tahun 2016)

Penambahan ketentuan untuk Pasal 26 Amandemen Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Tahun 2016 yang mengatur bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik (a) menyediakan mekanisme untuk menghapus informasi atau data elektronik yang tidak relevan dan bahwa mereka (b) menghapus semua informasi elektronik atau catatan elektronik yang dikuasainya menurut perintah pengadilan atas inisiasi orang yang bersangkutan. Meskipun hal ini tampaknya memberi individu elemen perlindungan privasi, amandemen tersebut kurang spesifik tentang keadaan di mana informasi elektronik dapat dianggap 'tidak relevan', atau kriteria untuk dianggap sebagai 'orang yang relevan'.

Kekhawatiran atas potensi penyalahgunaan telah dikemukakan dalam sebuah pernyataan oleh Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen, yang berpendapat bahwa ketentuan tersebut dapat menjadi ancaman potensial terhadap kebebasan pers, karena “siapa pun dapat meminta perintah pengadilan dengan impunitas untuk menghapus konten berita negatif tentang mereka di media digital”.

Sensor dan pengawasan

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-undang tahun 2008 tentang pornografi melarang pembuatan, penyebaran, atau konsumsi materi pornografi. Undang-undang memberikan definisi yang longgar tentang apa yang merupakan pornografi, hingga mengkriminalkan tindakan seperti berciuman bibir di depan umum, mempertontonkan bagian tubuh yang sensual (didefinisikan dalam Pasal 4 sebagai alat kelamin, bokong, pinggul, paha, pusar dan payudara wanita), atau segala bentuk ekspresi seni dan budaya yang dianggap eksplisit. Bagian 4:1a undang-undang secara eksplisit melarang tindakan atau presentasi tulisan/audio-visual apa pun dari aktivitas seksual yang melibatkan hubungan sesama jenis. Undang-undang tersebut secara rutin digunakan untuk menyensor konten LGBTQ+ di internet.

Pasal 40 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Undang-Undang No 11 tahun 2008

Pasal 40 UU ITE tersebut memerintahkan secara terbuka bahwa pemerintah melindungi kepentingan umum dari penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik yang dianggap sebagai ancaman terhadap kepentingan umum serta dapat mengganggu ketertiban umum.

Amandemen 2016 memperluas kewenangan pemerintah dengan penambahan 2 sub ayat Pasal 40 yang mengatur bahwa pemerintah berwenang melakukan tindakan preventif terhadap penyebaran informasi elektronik dan dokumen yang memuat konten yang melanggar hukum yang berlaku, seperti ujaran kebencian, materi yang pencemaran nama baik, atau konten yang tidak bermoral. Amandemen tersebut meningkatkan ruang lingkup pemerintah dalam memantau informasi elektronik, mengizinkan mereka untuk menghentikan akses ke konten yang dianggap dalam kriteria tersebut.

Penanganan Situs Internet Yang Memuat Konten Negatif Peraturan Menteri No 19 tahun 2014

Pada bulan Juli 2014, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif mulai berlaku sebagai bagian dari program regulator Internet Sehat dan Aman (INSAN).

Undang-undang mengamankan ISP untuk memblokir setiap konten internet yang dianggap mengandung unsur "negatif" seperti pornografi, hoax, atau konflik SARA. Sebagai regulator internet utama, kementerian mengelola basis data situs yang diblokir yang dikenal sebagai TrustPositif yang harus diperiksa oleh ISP untuk menerapkan sensor internet. Peraturan tersebut menuai kritik dari organisasi masyarakat sipil karena potensi penyalahgunaannya.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat

Undang-undang tersebut mulai berlaku pada November 2020 untuk menggantikan dan memantapkan Peraturan Kominfo Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif dan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik. Undang-undang mewajibkan penyelenggara sistem elektronik swasta (penyelenggara sistem elektronik atau PSE) untuk mendaftarkan diri ke Kominfo sebelum memberikan layanan apa pun kepada pengguna internet.

Melalui sistem pendaftaran tunggal, PSE harus mengungkapkan cara kerja sistem mereka dan jenis informasi pengguna yang mereka kumpulkan, simpan, dan proses. Undang-undang tersebut tidak hanya berlaku bagi penyelenggara dalam negeri tetapi juga bagi PSE swasta asing yang memiliki pengguna di Indonesia. Jika gagal mendaftar, Kominfo akan memblokir situs web PSE swasta di Indonesia.

Undang-undang ini mengalihkan beban pengaturan kepada PSE yang sekarang harus memastikan bahwa sistem mereka tidak mengandung konten elektronik terlarang atau memfasilitasi penyebaran konten terlarang. Tanggung jawab ini juga meluas ke platform yang menghosting konten buatan pengguna seperti penyedia hosting web dan operator komputasi awan yang merupakan PSE dengan hak mereka sendiri. Menurut dokumen internal kepada pelaku industri, regulator berencana untuk mengenakan denda hingga \$33.000 pada PSE atas kegagalan menghapus konten terlarang di bawah rezim ini.

PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik) harus menghapus konten yang dilarang dalam waktu 24 jam – atau 4 jam dalam kasus terorisme, pornografi, atau pelanggaran hukum lainnya – atas peringatan dari Kominfo dimana regulator memiliki kewenangan untuk menginstruksikan

ISP (Penyedia Layanan Internet) memblokir akses pengguna PSE. Berdasarkan undang-undang ini, Kominfo atau lembaga pemerintah terkait dapat memaksa PSE untuk menyediakan akses ke sistemnya untuk tujuan pengawasan dan penegakan hukum.

Para pejuang kebebasan internet menyuarakan keprihatinan atas pelanggaran kebebasan berekspresi dan berpendapat secara daring. Definisi konten yang dilarang sebagai segala sesuatu yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum terlalu luas dan dapat digunakan untuk mengurangi perbedaan pendapat. Para aktivis juga khawatir jika aparat negara dapat menyalahgunakan wewenang pengawasan dan penegakan hukum untuk menargetkan para pembela hak asasi manusia, terutama yang memperjuangkan hak-hak perempuan, kelompok LGBTQ+, dan minoritas etnis dan agama. Menurut para aktivis, undang-undang tersebut tidak sejalan dengan konstitusi Indonesia dan kewajiban negara terhadap hak asasi manusia internasional.

Kasus sensor internet

TrustPositif oleh Kominfo

Per September 2022, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah memblokir lebih dari 1.000.000 situs web melalui TrustPositif, yaitu sebuah aplikasi penyaring yang telah beroperasi sejak tahun 2010 sesuai Peraturan Kementerian No 19 tahun 2014. Kebanyakan situs web yang diblokir tersebut masuk ke dalam kategori perjudian dan pornografi. Kategori situs web lainnya yang diblokir termasuk penipuan online, pelanggaran kekayaan intelektual, dan "konten negatif" yang disarankan oleh agensi dari sektor terkait. Baru-baru ini terdapat kasus yang dilaporkan mengenai nama domain yang baru saja terdaftar langsung diblokir secara salah di TrustPositif. Seorang pejabat dari Kominfo mengklaim bahwa pemblokiran tersebut didasarkan pada laporan masyarakat.

Permintaan untuk menutup aplikasi LGBTQ+

Kominfo meminta Google agar menghapus 73 aplikasi terkait komunitas LGBTQ+ dari PlayStore Google di Indonesia. Aplikasi yang teridentifikasi tersebut terutama berupa aplikasi perpesanan instan, kencan online, dan jejaring sosial yang didedikasikan untuk komunitas LGBTQ+. Saat mengisolasi Blued, kementerian mengonfirmasi telah memblokir penggunaan aplikasi jejaring sosial gay tersebut, namun aplikasi tersebut nampaknya telah dialihkan melalui DNS yang berbeda.

"Tipuan" menghapus permintaan

Kominfo menyebutkan bahwa mereka telah menghapus lebih dari 565.000 "konten hoaks" yang beredar di media sosial pada tahun 2021 yang diklaim sebagian besar terkait dengan hoaks Covid-19. Mereka juga mengklaim telah memblokir "situs penyebar hoaks" dan meminta perusahaan teknologi besar untuk menghapus serta menangguk tautan dan akun di platform mereka.

Namun, "hoaks"—label yang umum dikenakan untuk segala macam keterangan yang salah dan disinformasi—semakin sering digunakan untuk melakukan delegitimasi pada lawan

politik, dan membenarkan keputusan jaringan internet. Pemerintah memberedel dan memutuskan jaringan internet di Papua Barat pada 2019 pada saat wilayah tersebut dianggap “dibanjiri hoaks”. Para aktivis yang memprotes Omnibus Law pada 2020 ditangkap dengan alasan “menyebarkan hoaks” karena mereka membagikan draf awal Undang-Undang ini. Sebagai ukuran agar kelihatan sebagai pemeriksa fakta yang sah, Kominfo terus menerus berusaha memverifikasi dan melabel konten sebagai “hoaks” karena dianggap berisi keterangan yang salah, hingga sejauh melabel meme penghibur dewasa Ricardo Milos yang digambarkan pada seragam partai yang memerintah PDIP sebagai hoaks.

Sensor internet ekstrateritorial

Pada bulan Juni 2022, Kominfo mengancam akan memblokir platform teknologi besar seperti Google, Facebook, Twitter, dan lainnya karena tidak mendaftarkan diri sebagai PSE lingkup privat sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020. Paypal, Yahoo, Epic Games, dan Steam termasuk di antara situs yang diblokir oleh regulator karena gagal menyelesaikan pendaftaran PSE lingkup privat mereka sebelum batas waktu Juli 2022. Per Agustus 2022, lebih dari 289 PSE lingkup privat asing telah terdaftar di Kominfo dan beberapa dari PSE tersebut telah ditangguhkan karena aktivitas perjudian ilegal.

Penodaan agama dan sensor internet

Pada Maret 2022, mantan penceramah YouTube Muslim Saifuddin Ibrahim (juga dikenal sebagai Abraham Ben Moses) menjadi sasaran hukum penistaan agama karena pandangannya yang provokatif dan kritis terhadap ajaran dan praktik Islam. Menyusul penyelidikan, polisi Indonesia berkoordinasi dengan Kominfo untuk menghapus saluran YouTube Saifuddin Ibrahim menurut laporan berita. Namun, hingga April 2022, kedua saluran YouTube milik penceramah yang berbasis di AS tersebut masih belum diblokir di Indonesia.

Pada April 2022, sayap pemuda dari kelompok Muslim moderat Nahdlatul Ulama, Gerakan Pemuda Anshor, melaporkan akun Facebook bernama Husain ke polisi dengan tuduhan menyebarkan ajaran sesat. Polisi terus menyelidiki akun tersebut dan memburu orang di balik akun tersebut. Tidak ada laporan berita lebih lanjut tentang kasus ini, tetapi warga melaporkan ke polisi atas tuduhan penistaan atau ajaran sesat, bersama dengan permintaan untuk menutup akun dan situs web, adalah hal yang biasa terjadi. Seperti yang terjadi pada Joseph Paul Zhang pada 2021 yang mengaku sebagai nabi, Ketua Kelompok Doa Hati Kudus Allah Kerahiman Ilahi yang pada 2019 dituduh setara dengan Yesus, Gerakan Gafatar hak atas tanah yang dituduh pada 2016 atas sinkretis, dan kasus terkenal agama Salamullah yang dipimpin oleh Lia Eden, yang ditangkap pada 2008.

Sensor internet dan Anti-Pancasila

Pada Juni 2022, polisi Indonesia menangkap para pemimpin organisasi spiritual Khilafatul Muslimin dan membubarkan organisasi tersebut, atas tuduhan bahwa aktivitas organisasi tersebut bertentangan dengan Pancasila. Penangkapan itu didukung oleh badan anti-terorisme negara. Situs web dan saluran YouTube Khilafatul Muslimin telah ditutup menyusul penangkapan tersebut. Para kritikus mencatat bahwa pemerintah mengacaukan gerakan spiritual yang melihat ke dalam dengan organisasi politik karena organisasi tersebut

menyandang nama kekhalifahan (khilafah).

Upaya ini merupakan bagian dari kebangkitan kembali doktrin Pancasila sebagai pedoman kebijakan pemerintah untuk menangkal oposisi, yang oleh sebagian kalangan disebut sebagai giliran otoriter Indonesia. Sejak pembubaran organisasi Islam Hizbut Tahrir Indonesia setelah pemilihan Jakarta pada tahun 2017, pemerintah pusat secara aktif menindak organisasi yang dianggap “radikal” dan “makar”. Tindakan ini termasuk penataan kembali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) independen dan pemecatan personelnya pada 2019 karena dituduh dikuasai oleh Taliban. Dengan dukungan dari salah satu organisasi Islam moderat terbesar Nahdlatul Ulama, pemerintah berada di antara garis tipis memerangi ekstremisme dan sensor hipernasionalis.

Mengkaji sensor internet di Indonesia

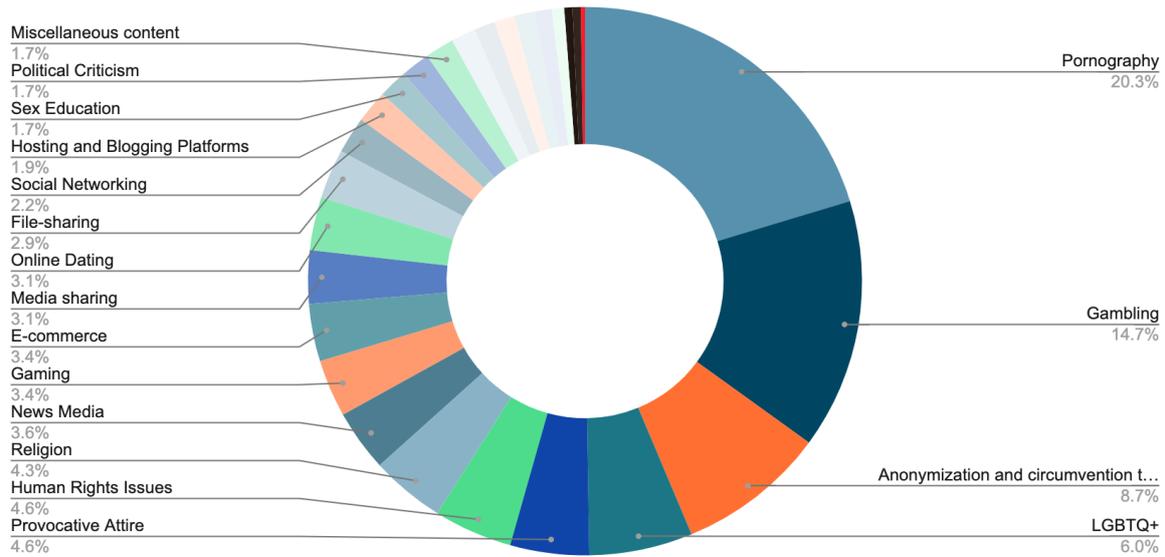
Temuan

Situs Web Diblokir

Banyak situs ditemukan diblokir di Indonesia sebagai bagian dari penelitian ini. Analisis dari data pengukuran jaringan yang dikumpulkan melalui tes Konektifitas Situs OONI Probe yang melibatkan 2,474 situs di 62 ISP, kami menemukan bahwa ISP Indonesia melayani pemblokiran halaman untuk 414 situs terutama melalui pembajakan DNS (95% dari situs yang diuji). Kebanyakan dari pengukuran situs yang diblokir ini menunjukkan anomali sebagai bagian dari pengetesan, yang perlu diteliti lebih lanjut.

Situs yang diblokir terdiri dari beberapa kategori, di antaranya adalah pornografi, perjudian, alat anonimisasi dan pengelakan, LGBTQ+, pakaian provokatif, media berita, agama, game, masalah hak asasi manusia, berbagi file dan media, dan lain-lain.

Tabel di bawah menunjukkan sebaran situs web yang terkonfirmasi diblokir di Indonesia berdasarkan kategori sebagai bagian dari studi ini dari 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022.



Category		Situs Web Diblokir	Pengukuran OONI Probe	OONI Probe Confirmed Blocks	Tingkat Pemblokiran
PORN	Pornografi	84	6,692	3,883	58.02%
GMB	Perjudian	61	6,276	2,771	44.15%
ANON	Fitur anonimisasi dan pengelakan	36	6,926	436	6.30%
LGBT	LGBTQ+	25	3,921	2,280	58.15%
PROV	Pakaian Provokatif	19	2,284	1,282	56.13%
HUMR	Isu Hak Asasi Manusia	19	3,357	1,498	44.62%
REL	Agama	18	3,092	1,440	46.57%
NEWS	Media Berita	15	3,164	978	30.91%
GAME	Game	14	584	332	56.85%
COMM	E-niaga	14	1,102	352	31.94%
MMED	Media sharing	13	2,630	1,419	53.95%
DATE	Kencan Online	13	1,602	746	46.57%
FILE	Berbagi file	12	1,352	468	34.62%
GRP	Jejaring Sosial	9	1,875	751	40.05%
HOST	Platform Hosting dan Blogging	8	1,246	374	30.02%
XED	Pendidikan Seks	7	1,044	495	47.41%
POLR	Kritik Politik	7	1,549	570	36.80%
MISC	Konten lain-lain	7	132	7	5.30%

Category		Situs Web Diblokir	Pengukuran OONI Probe	OONI Probe Confirmed Blocks	Tingkat Pemblokiran
CULTR	Budaya	6	669	302	45.14%
PUBH	Kesehatan Masyarakat	5	572	258	45.10%
HATE	Ujaran Kebencian	5	498	197	39.56%
ALDR	Alkohol & Narkoba	5	599	228	38.06%
HACK	Alat Hacking	4	231	1	0.43%
ENV	Lingkungan	3	447	98	21.92%
COMT	Alat Komunikasi	2	206	93	45.15%
MILX	Terorisme dan Militan	2	192	6	3.13%
GOVT	Pemerintah	1	15	0	0.00%
Aggregate		414	52,257	21,265	40.69%

Pornografi

84 situs web pornografi telah diblokir selama periode pengujian 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022. 75 situs web ini dikonfirmasi melalui OONI Probe sementara 9 lainnya dikonfirmasi melalui analisis heuristik. Pengukuran tersebut mencakup situs web yang salah dikategorikan sebagai LGBTQ+ (www.bglad.com dan www.gayscape.com) dan sebagai media berita (pornhub.com dan xvideos.com) dalam daftar pengujian.

Situs web	Terukur	Diblokir	Tidak Diblokir	Ganjil	Gagal
www.bglad.com	207	127 (61.35%)	7 (3.38%)	30 (14.49%)	43 (20.77%)
www.gayscape.com	206	127 (61.65%)	9 (4.37%)	27 (13.11%)	43 (20.87%)
www.pornhub.com	145	80 (55.17%)	6 (4.14%)	31 (21.38%)	28 (19.31%)
alt.com	130	84 (64.62%)	6 (4.62%)	22 (16.92%)	18 (13.85%)
beeg.com	128	81 (63.28%)	4 (3.13%)	25 (19.53%)	18 (14.06%)
www.xvideos.com	125	76 (60.8%)	3 (2.4%)	12 (9.6%)	34 (27.2%)
www.purextc.com	121	72 (59.5%)	5 (4.13%)	23 (19.01%)	21 (17.36%)
hotgaylist.com	121	70 (57.85%)	8 (6.61%)	19 (15.7%)	24 (19.83%)
www.sex.com	121	70 (57.85%)	4 (3.31%)	18 (14.88%)	29 (23.97%)
www.wetplace.com	120	72 (60%)	3 (2.5%)	34 (28.33%)	11 (9.17%)

Situs web	Terukur	Diblokir	Tidak Diblokir	Ganjil	Gagal
www.bglad.com	207	127 (61.35%)	7 (3.38%)	30 (14.49%)	43 (20.77%)
www.livejasmin.com	120	69 (57.5%)	3 (2.5%)	24 (20%)	24 (20%)
milfhunter.com	120	74 (61.67%)	4 (3.33%)	22 (18.33%)	20 (16.67%)
www.playboy.com	120	70 (58.33%)	4 (3.33%)	22 (18.33%)	24 (20%)
realdoll.com	120	78 (65%)	4 (3.33%)	18 (15%)	20 (16.67%)
xhamster.com	120	73 (60.83%)	6 (5%)	18 (15%)	23 (19.17%)
www.freegaypornfinder.com	120	73 (60.83%)	3 (2.5%)	13 (10.83%)	31 (25.83%)
youjizz.com	120	71 (59.17%)	2 (1.67%)	13 (10.83%)	34 (28.33%)
hardsextube.com	119	70 (58.82%)	7 (5.88%)	41 (34.45%)	1 (0.84%)
www.nurumassage.net	119	67 (56.3%)	4 (3.36%)	23 (19.33%)	25 (21.01%)
www.tubev.sex	119	67 (56.3%)	6 (5.04%)	22 (18.49%)	24 (20.17%)

Contoh situs web pornografi yang diblokir di Indonesia

Perjudian

61 situs web perjudian telah diblokir selama periode pengujian 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022. Semua situs web, kecuali lima diantaranya, dikonfirmasi melalui OONI Probe. Kelima situs web tersebut hanya dapat dipastikan telah diblokir melalui heuristik.

Situs web	Terukur	Diblokir	Tidak Diblokir	Ganjil	Gagal
198.96.92.14	123	1 (0.81%)	0 (0%)	7 (5.69%)	115 (93.5%)
88bola.com	122	78 (63.93%)	5 (4.1%)	16 (13.11%)	23 (18.85%)
bolazoom.com	122	73 (59.84%)	9 (7.38%)	5 (4.1%)	35 (28.69%)
www.slotland.com	121	73 (60.33%)	4 (3.31%)	19 (15.7%)	25 (20.66%)
indolucky7.com	121	74 (61.16%)	9 (7.44%)	10 (8.26%)	28 (23.14%)
www.usacasino.com	121	19 (15.7%)	2 (1.65%)	46 (38.02%)	54 (44.63%)
fifabola.com	120	69 (57.5%)	6 (5%)	35 (29.17%)	10 (8.33%)
human-rights-for-all.org	120	67 (55.83%)	6 (5%)	19 (15.83%)	28 (23.33%)
www.gambling.com	120	68 (56.67%)	9 (7.5%)	19 (15.83%)	24 (20%)
www.poker.com	120	66 (55%)	5 (4.17%)	18 (15%)	31 (25.83%)
www.spinpalace.com	120	65 (54.17%)	4 (3.33%)	16 (13.33%)	35 (29.17%)

Situs web	Terukur	Diblokir	Tidak Diblokir	Ganjil	Gagal
198.96.92.14	123	1 (0.81%)	0 (0%)	7 (5.69%)	115 (93.5%)
www.sportsinter action.com	120	66 (55%)	3 (2.5%)	18 (15%)	33 (27.5%)
www.betfair.co m	120	70 (58.33%)	4 (3.33%)	20 (16.67%)	26 (21.67%)
www.royalvega s.com	120	16 (13.33%)	4 (3.33%)	67 (55.83%)	33 (27.5%)
axiooqq.online	119	52 (43.7%)	13 (10.92%)	19 (15.97%)	35 (29.41%)
bolanaga.com	119	70 (58.82%)	7 (5.88%)	1 (0.84%)	41 (34.45%)
bolauntung.com	119	66 (55.46%)	7 (5.88%)	20 (16.81%)	26 (21.85%)
taruhan.org	119	67 (56.3%)	4 (3.36%)	48 (40.34%)	0 (0%)
www.onlinegam bling.com	119	67 (56.3%)	4 (3.36%)	22 (18.49%)	26 (21.85%)
www.partypoke r.com	119	62 (52.1%)	4 (3.36%)	26 (21.85%)	27 (22.69%)

Contoh situs web anonimisasi dan pengelakan yang diblokir di Indonesia

Fitur anonimisasi dan pengelakan

Indonesian telah memblokir 36 situs web yang menyediakan fitur anonimisasi dan pengelakan selama periode pengujian 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022. Sebagian besar situs web ini menyediakan proxy web, layanan jaringan pribadi virtual, dan fitur lain yang membantu pengguna internet melindungi anonimitas mereka dan menghindari sensor online. Semua situs web dalam kategori ini dapat dipastikan diblokir menggunakan OONI Probe kecuali tujuh situs web yang dipastikan diblokir melalui heuristik saja.

Situs web	Terukur	Diblokir	Tidak Diblokir	Ganjil	Gagal
www.xroxy.com	405	3 (0.74%)	0 (0%)	8 (1.98%)	394 (97.28%)
multiproxy.org	230	4 (1.74%)	0 (0%)	1 (0.43%)	225 (97.83%)
guardster.com	218	3 (1.38%)	2 (0.92%)	4 (1.83%)	209 (95.87%)
anonymizer.sec user.com	216	3 (1.39%)	0 (0%)	4 (1.85%)	209 (96.76%)
proxify.com	216	0 (0%)	0 (0%)	6 (2.78%)	210 (97.22%)
hola.org	216	1 (0.46%)	1 (0.46%)	4 (1.85%)	210 (97.22%)
anonymouse.or g	215	129 (60%)	5 (2.33%)	26 (12.09%)	55 (25.58%)
anonymousprox ylist.net	214	0 (0%)	0 (0%)	5 (2.34%)	209 (97.66%)
proxy.org	214	2 (0.93%)	1 (0.47%)	9 (4.21%)	202 (94.39%)
anonymat.org	212	3 (1.42%)	0 (0%)	3 (1.42%)	206 (97.17%)
www.allproxysit es.com	211	12 (5.69%)	2 (0.95%)	102 (48.34%)	95 (45.02%)

Situs web	Terukur	Diblokir	Tidak Diblokir	Ganjil	Gagal
tor.eff.org	209	1 (0.48%)	1 (0.48%)	9 (4.31%)	198 (94.74%)
securevpn.im	209	1 (0.48%)	0 (0%)	1 (0.48%)	207 (99.04%)
www.betternet.co	209	1 (0.48%)	0 (0%)	0 (0%)	208 (99.52%)
www.http-tunnel.com	208	2 (0.96%)	1 (0.48%)	4 (1.92%)	201 (96.63%)
www.torproject.org	208	0 (0%)	0 (0%)	4 (1.92%)	204 (98.08%)
www.anonymsurfen.com	207	5 (2.42%)	0 (0%)	3 (1.45%)	199 (96.14%)
www.hidemyass.com	207	0 (0%)	0 (0%)	4 (1.93%)	203 (98.07%)
www.inetprivacy.com	207	2 (0.97%)	0 (0%)	2 (0.97%)	203 (98.07%)
www.megaproxy.com	207	0 (0%)	0 (0%)	5 (2.42%)	202 (97.58%)

Contoh situs anonimisasi dan pengelakan yang diblokir di Indonesia

LGBTQ+

Indonesia telah memblokir 25 situs web LGBTQ+ selama periode pengujian 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022. 25 situs web tersebut meliputi situs web organisasi hak LGBTQ+, forum online, majalah, pemesanan perjalanan, dan lainnya. Semua situs web ini dipastikan diblokir berdasarkan data pengukuran OONI Probe kecuali empat situs web yang hanya dapat dikonfirmasi melalui analisis heuristik. Tiga situs kencan online (www.grindr.com, www.planetromeo.com, dan www.scruff.com) dan dua situs pornografi (www.bglad.com dan www.gayscape.com) juga dikategorikan sebagai situs LGBTQ+ dalam daftar uji.

Situs web	Terukur	Diblokir	Tidak Diblokir	Ganjil	Gagal
ilga.org	230	137 (59.57%)	2 (0.87%)	38 (16.52%)	53 (23.04%)
gayindonesiaforum.com	216	135 (62.5%)	5 (2.31%)	25 (11.57%)	51 (23.61%)
pridesource.com	215	119 (55.35%)	2 (0.93%)	40 (18.6%)	54 (25.12%)
www.gay.com	210	133 (63.33%)	7 (3.33%)	24 (11.43%)	46 (21.9%)
transsexual.org	209	129 (61.72%)	7 (3.35%)	20 (9.57%)	53 (25.36%)
www.gayegypt.com	208	134 (64.42%)	8 (3.85%)	25 (12.02%)	41 (19.71%)
www.shoe.org	207	116 (56.04%)	7 (3.38%)	37 (17.87%)	47 (22.71%)
www.ifge.org	207	129 (62.32%)	8 (3.86%)	26 (12.56%)	44 (21.26%)
www.glbtq.com	206	131 (63.59%)	9 (4.37%)	32 (15.53%)	34 (16.5%)
www.gliil.org	206	122 (59.22%)	9 (4.37%)	26 (12.62%)	49 (23.79%)

Situs web	Terukur	Diblokir	Tidak Diblokir	Ganjil	Gagal
www.ilga-europe.org	206	105 (50.97%)	8 (3.88%)	36 (17.48%)	57 (27.67%)
www.tsroadmap.com	205	126 (61.46%)	8 (3.9%)	28 (13.66%)	43 (20.98%)
www.nifty.org	205	108 (52.68%)	7 (3.41%)	36 (17.56%)	54 (26.34%)
www.out.com	204	120 (58.82%)	7 (3.43%)	34 (16.67%)	43 (21.08%)
www.queernet.org	202	125 (61.88%)	9 (4.46%)	24 (11.88%)	44 (21.78%)
www.samesexmarriage.ca	202	127 (62.87%)	10 (4.95%)	25 (12.38%)	40 (19.8%)
www.nclrights.org	201	121 (60.2%)	9 (4.48%)	26 (12.94%)	45 (22.39%)
bisexual.org	176	107 (60.8%)	3 (1.7%)	35 (19.89%)	31 (17.61%)
www.lgbtglobalfaith.org	122	8 (6.56%)	1 (0.82%)	60 (49.18%)	53 (43.44%)
bi.org	49	24 (48.98%)	1 (2.04%)	5 (10.2%)	19 (38.78%)

Contoh situs web LGBTQ+ yang diblokir di Indonesia

Media Berita

15 situs web media berita diketahui telah diblokir selama masa pengujian dari tanggal 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022. 9 dari situs web ini dipastikan melalui OONI Probe, sementara 6 dipastikan melalui analisis heuristik.

Ini tidak termasuk tiga situs web yang salah dikategorikan sebagai media berita www.reddit.com (jejaring sosial) serta [pornhub.com](https://www.pornhub.com) dan [xvideos.com](https://www.xvideos.com) (pornografi). Beberapa situs tersebut ([hariankompas.net](https://www.hariankompas.net), [kabobfest.com](https://www.kabobfest.com)) seolah-olah merupakan ladang konten yang menyamar sebagai outlet berita dengan mengambil nama publikasi besar ([kompas.com](https://www.kompas.com)), atau situs perjudian yang menyamar sebagai outlet berita untuk mempromosikan perjudian.

Situs web	Terukur	Diblokir	Tidak Diblokir	Ganjil	Gagal
crito.jw.lt	218	133 (61.01%)	5 (2.29%)	31 (14.22%)	49 (22.48%)
papuapost.com	217	142 (65.44%)	5 (2.3%)	54 (24.88%)	16 (7.37%)
opinibangsa.com	216	113 (52.31%)	4 (1.85%)	34 (15.74%)	65 (30.09%)
harianandalas.com	216	52 (24.07%)	16 (7.41%)	20 (9.26%)	128 (59.26%)
beritasore.com	215	124 (57.67%)	5 (2.33%)	30 (13.95%)	56 (26.05%)
hariankompas.net	215	112 (52.09%)	18 (8.37%)	12 (5.58%)	73 (33.95%)
www.balipost.co.id	208	108 (51.92%)	7 (3.37%)	39 (18.75%)	54 (25.96%)

Situs web	Terukur	Diblokir	Tidak Diblokir	Ganjil	Gagal
www.warungbebas.com	202	128 (63.37%)	9 (4.46%)	24 (11.88%)	41 (20.3%)
www.kabobfest.com	186	66 (35.48%)	8 (4.3%)	24 (12.9%)	88 (47.31%)
kepri.haluan.co	217	0 (0%)	19 (8.76%)	68 (31.34%)	130 (59.91%)
www.galamedia news.com	215	0 (0%)	22 (10.23%)	68 (31.63%)	125 (58.14%)
samudranesia.id	214	0 (0%)	13 (6.07%)	2 (0.93%)	199 (92.99%)
sulawesi24.com	213	0 (0%)	17 (7.98%)	139 (65.26%)	57 (26.76%)
www.bldaily.com	209	0 (0%)	26 (12.44%)	72 (34.45%)	111 (53.11%)
www.ruf-ch.org	203	0 (0%)	11 (5.42%)	3 (1.48%)	189 (93.1%)

Situs media berita diblokir di Indonesia

Agama

Sebanyak 18 situs web yang terkait dengan agama telah diblokir di Indonesia selama periode pengujian 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022. Semua situs web, kecuali empat diantaranya, dikonfirmasi melalui OONI Probe. Empat situs web tersebut hanya dikonfirmasi apabila telah terblokir melalui heuristik.

Situs web	Terukur	Diblokir	Tidak Diblokir	Ganjil	Gagal
exmuslim.wordpress.com	312	164 (52.56%)	9 (2.88%)	52 (16.67%)	87 (27.88%)
thequran.com	153	80 (52.29%)	2 (1.31%)	19 (12.42%)	52 (33.99%)
trulyislam.blogspot.com	156	90 (57.69%)	1 (0.64%)	23 (14.74%)	42 (26.92%)
www.arahmah.com	155	72 (46.45%)	6 (3.87%)	48 (30.97%)	29 (18.71%)
www.komunitas eden.com	158	89 (56.33%)	4 (2.53%)	27 (17.09%)	38 (24.05%)
beritamuslim.wordpress.com	313	170 (54.31%)	5 (1.6%)	44 (14.06%)	94 (30.03%)
indonesia.faithfreedom.org	313	168 (53.67%)	8 (2.56%)	38 (12.14%)	99 (31.63%)
answering-islam.org	156	70 (44.87%)	6 (3.85%)	36 (23.08%)	44 (28.21%)
www.faithfreedom.org	155	93 (60%)	1 (0.65%)	20 (12.9%)	41 (26.45%)
www.gensyiah.com	155	91 (58.71%)	1 (0.65%)	21 (13.55%)	42 (27.1%)
www.raymondibrahim.com	159	93 (58.49%)	4 (2.52%)	20 (12.58%)	42 (26.42%)

Situs web	Terukur	Diblokir	Tidak Diblokir	Ganjil	Gagal
www.submission.org	154	6 (3.9%)	1 (0.65%)	7 (4.55%)	140 (90.91%)
www.jesus saves.cc	153	0 (0%)	3 (1.96%)	15 (9.8%)	135 (88.24%)
www.murtadz.xyz	155	0 (0%)	19 (12.26%)	45 (29.03%)	91 (58.71%)
islamagama setan.blogspot.co.id	155	75 (48.39%)	6 (3.87%)	33 (21.29%)	41 (26.45%)
komiknabimuhammad.blogspot.com	156	85 (54.49%)	2 (1.28%)	19 (12.18%)	50 (32.05%)
cbst.org	1	0 (0%)	0 (0%)	1 (100%)	0 (0%)
mualaf-alhamdulillah.blogspot.com	133	94 (70.68%)	1 (0.75%)	10 (7.52%)	28 (21.05%)

Indonesia memblokir situs web yang terkait agama

Pakaian Provokatif

19 situs web provokatif telah diblokir di Indonesia selama periode pengujian 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022. Situs tersebut termasuk majalah gaya hidup pria, toko pakaian dalam online, blog berita selebriti, subkultur nudisme, dan situs web serupa lainnya. Semua situs web dipastikan telah diblokir berdasarkan data pengukuran dari OONI Probe.

Situs web	Terukur	Diblokir	Tidak Diblokir	Ganjil	Gagal
fhm.com	239	130 (54.39%)	13 (5.44%)	42 (17.57%)	54 (22.59%)
fhm.nl	120	65 (54.17%)	6 (5%)	21 (17.5%)	28 (23.33%)
panties.com	117	68 (58.12%)	8 (6.84%)	24 (20.51%)	17 (14.53%)
trashy.com	117	71 (60.68%)	5 (4.27%)	24 (20.51%)	17 (14.53%)
www.3wishes.com	117	68 (58.12%)	8 (6.84%)	24 (20.51%)	17 (14.53%)
www.agentprovocateur.com	126	75 (59.52%)	4 (3.17%)	21 (16.67%)	26 (20.63%)
www.bodylingerie.com	117	72 (61.54%)	3 (2.56%)	17 (14.53%)	25 (21.37%)
www.delicates.co.uk	117	67 (57.26%)	2 (1.71%)	18 (15.38%)	30 (25.64%)
www.fotoartis.in	119	67 (56.3%)	4 (3.36%)	19 (15.97%)	29 (24.37%)
www.maxim.com	120	67 (55.83%)	4 (3.33%)	24 (20%)	25 (20.83%)
www.purenudism.net	119	69 (57.98%)	5 (4.2%)	20 (16.81%)	25 (21.01%)
www.smog.pl	118	70 (59.32%)	3 (2.54%)	13 (11.02%)	32 (27.12%)

Situs web	Terukur	Diblokir	Tidak Diblokir	Ganjil	Gagal
www.trashy.com	120	72 (60%)	3 (2.5%)	14 (11.67%)	31 (25.83%)
profilselebryti.blogspot.com	120	75 (62.5%)	7 (5.83%)	17 (14.17%)	21 (17.5%)
www.chantelle.com	119	74 (62.18%)	2 (1.68%)	20 (16.81%)	23 (19.33%)
www.coquette.com	118	76 (64.41%)	2 (1.69%)	18 (15.25%)	22 (18.64%)
beritapanasselebritis.blogspot.com	122	79 (64.75%)	2 (1.64%)	20 (16.39%)	21 (17.21%)
www.lingerieboyl.com	19	13 (68.42%)	1 (5.26%)	5 (26.32%)	0 (0%)
duniamalam168.com	120	4 (3.33%)	1 (0.83%)	62 (51.67%)	53 (44.17%)

Indonesia memblokir situs web yang terkait dengan pakaian provokatif

Isu Hak Asasi Manusia

20 situs web terkait isu HAM telah diblokir di Indonesia selama masa pengujian 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022. Semua situs web dalam kategori ini dapat dipastikan diblokir menggunakan OONI Probe kecuali dua situs web yang dipastikan diblokir melalui heuristik saja.

Pengukuran ini mencakup enam situs web yang salah dikategorikan sebagai Terorisme dan Militan dalam daftar pengujian. Situs web ini sebenarnya bukan situs web teroris atau militan tetapi mereka mewakili para pemimpin dan kelompok gerakan pro-kemerdekaan Papua Barat.

Situs web	Terukur	Diblokir	Tidak Diblokir	Ganjil	Gagal
guerrillagirls.com	218	135 (61.93%)	7 (3.21%)	32 (14.68%)	44 (20.18%)
infopapua.org	218	135 (61.93%)	3 (1.38%)	24 (11.01%)	56 (25.69%)
hrwg.org	217	109 (50.23%)	7 (3.23%)	36 (16.59%)	65 (29.95%)
www.guerrillagirls.com	216	116 (53.7%)	6 (2.78%)	41 (18.98%)	53 (24.54%)
www.freespeechcoalition.com	212	122 (57.55%)	4 (1.89%)	37 (17.45%)	49 (23.11%)
www.freespeech.org	211	117 (55.45%)	5 (2.37%)	41 (19.43%)	48 (22.75%)
www.tifafoundation.org	209	34 (16.27%)	20 (9.57%)	44 (21.05%)	111 (53.11%)
www.mampu.or.id	207	0 (0%)	20 (9.66%)	24 (11.59%)	163 (78.74%)
www.hrusa.org	207	1 (0.48%)	0 (0%)	21 (10.14%)	185 (89.37%)

Situs web	Terukur	Diblokir	Tidak Diblokir	Ganjil	Gagal
www.hrcr.org	206	0 (0%)	13 (6.31%)	1 (0.49%)	192 (93.2%)
www.womenwarpeace.org	204	120 (58.82%)	7 (3.43%)	27 (13.24%)	50 (24.51%)
www.womenonwaves.org	204	3 (1.47%)	0 (0%)	1 (0.49%)	200 (98.04%)
secure.avaaz.org	167	82 (49.1%)	9 (5.39%)	27 (16.17%)	49 (29.34%)
www.ilhr.org	153	87 (56.86%)	4 (2.61%)	26 (16.99%)	36 (23.53%)
freepapua.com	124	77 (62.1%)	6 (4.84%)	21 (16.94%)	20 (16.13%)
www.freewestpapua.org	120	72 (60%)	6 (5%)	23 (19.17%)	19 (15.83%)
www.ilwp.org	118	73 (61.86%)	5 (4.24%)	17 (14.41%)	23 (19.49%)
www.ipwp.org	118	76 (64.41%)	5 (4.24%)	15 (12.71%)	22 (18.64%)
www.ulmwp.org	118	67 (56.78%)	7 (5.93%)	17 (14.41%)	27 (22.88%)
www.bennywendada.org	117	72 (61.54%)	8 (6.84%)	20 (17.09%)	17 (14.53%)

Indonesian memblokir situs web yang terkait dengan masalah hak asasi manusia

Berbagi file dan media

Indonesia telah memblokir 25 situs web berbagi file dan media selama periode pengujian 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022. Semua situs web tersebut, kecuali tiga diantaranya, dikonfirmasi melalui OONI Probe. Ketiga situs web tersebut hanya dapat dipastikan diblokir melalui analisis heuristik.

Situs web	Terukur	Diblokir	Tidak Diblokir	Ganjil	Gagal
vimeo.com	448	219 (48.88%)	18 (4.02%)	88 (19.64%)	123 (27.46%)
dramaserial.xyz	183	110 (60.11%)	4 (2.19%)	5 (2.73%)	64 (34.97%)
filmapik.club	183	112 (61.2%)	5 (2.73%)	51 (27.87%)	15 (8.2%)
premierexxi.com	183	109 (59.56%)	3 (1.64%)	52 (28.42%)	19 (10.38%)
bigolivepc.com	182	116 (63.74%)	5 (2.75%)	21 (11.54%)	40 (21.98%)
bigospace.com	182	117 (64.29%)	6 (3.3%)	22 (12.09%)	37 (20.33%)
bioskopkerenin.com	182	110 (60.44%)	5 (2.75%)	2 (1.1%)	65 (35.71%)
dewabioskop21.org	182	114 (62.64%)	5 (2.75%)	10 (5.49%)	53 (29.12%)
filmapik.fun	181	100 (55.25%)	7 (3.87%)	34 (18.78%)	40 (22.1%)
idxx1.cam	181	94 (51.93%)	6 (3.31%)	55 (30.39%)	26 (14.36%)
juraganfilm.live	181	108 (59.67%)	10 (5.52%)	1 (0.55%)	62 (34.25%)
lk21tv.com	181	110 (60.77%)	5 (2.76%)	18 (9.94%)	48 (26.52%)
imgur.com	181	0 (0%)	0 (0%)	3 (1.66%)	178 (98.34%)

thepiratebay.org	143	86 (60.14%)	2 (1.4%)	20 (13.99%)	35 (24.48%)
subscene.com	139	76 (54.68%)	6 (4.32%)	13 (9.35%)	44 (31.65%)
savefrom.net	136	0 (0%)	1 (0.74%)	3 (2.21%)	132 (97.06%)
kat.sx	134	84 (62.69%)	4 (2.99%)	9 (6.72%)	37 (27.61%)
www.slsknet.org	133	2 (1.5%)	1 (0.75%)	5 (3.76%)	125 (93.98%)
www.serials.ws	133	0 (0%)	0 (0%)	2 (1.5%)	131 (98.5%)
www.speedtorrent.net	131	73 (55.73%)	4 (3.05%)	22 (16.79%)	32 (24.43%)

Indonesian telah memblokir situs berbagi file dan media

Perpesanan instan dan alat pengelakan

Sebagian besar pengukuran yang memeriksa jangkauan layanan pesan instan (Facebook Messenger, Telegram, Signal, WhatsApp) dan alat pengelakan (Psiphon dan Tor) tidak menunjukkan adanya pemblokiran selama periode pengujian. Namun, ada sejumlah kecil anomali yang mungkin perlu diselidiki lebih lanjut.

Tes	Terukur	Diblokir	Tidak Diblokir	Ganjil	Gagal	ISP
Facebook Messenger	3,998	–	3,901 (97.57%)	96 (2.40%)	1 (0.03%)	57
Telegram	4,051	–	3,893 (96.10%)	15 (73.88%)	1 (0.02%)	57
Signal	3,928	–	3,765 (95.85%)	16 (24.12%)	1 (0.03%)	56
WhatsApp	4,053	–	3,963 (97.78%)	89 (2.20%)	1 (0.02%)	57
Psiphon	4,028	–	3,998 (99.26%)	29 (0.72%)	1 (0.02%)	56
Tor	3,962	–	3,780 (95.41%)	18 (24.59%)	–	54
Tor Snowflake	137	–	118 (86.13%)	19 (13.87%)	–	29

Pengakuan keterbatasan

	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Agregat
Terukur	36,762	23,042	53,147	96,128	93,812	84,348	387,239
Diblokir	3,118	1,643	4,023	5,198	3,786	3,503	21,271

Tingkat Pemblokiran	8.48%	7.13%	7.57%	5.41%	4.04%	4.15%	5.49%
Hostname	2,308	2,164	2,124	2,106	2,108	2,231	2,473
ASN	22	21	23	35	31	23	62

Rangkuman data pengukuran Konektifitas Situs OONI Probe untuk Indonesia dari 1 Januari sampai 30 Juni 2022

Selama periode pengujian 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022, lebih dari 387.000 pengukuran konektivitas web di Indonesia dikumpulkan menggunakan OONI Probe. Distribusi pengukuran, bagaimanapun, tidak konsisten jika dibandingkan dari bulan ke bulan selama periode pengujian dengan lebih dari 70% dikumpulkan pada paruh kedua. Sebagai hasil dari pengukuran yang jauh lebih sedikit di paruh pertama, bulan Januari, Februari, dan Maret menunjukkan tingkat pemblokiran yang lebih tinggi. Ini artinya tidak ada kesimpulan yang dapat dipercaya apakah sensor internet telah meningkat atau memburuk di Indonesia selama periode enam bulan.

Keterbatasan lain dari penelitian ini adalah jumlah dan jenis situs web yang termasuk dalam pengukuran OONI Probe. Sebanyak 2.473 situs web diuji selama periode enam bulan, tetapi jumlah situs web yang diuji bervariasi jika dibandingkan dari bulan ke bulan yang berkisar antara 2.106 hingga 2.308 situs web. Meskipun varian yang rendah menunjukkan cakupan yang baik dari situs web yang diuji selama periode pengujian, sejumlah batasan harus diperhitungkan.

Daftar uji global dan negara ini berisi sangat sedikit sampel URL yang dapat dikunjungi oleh pengguna internet Indonesia. Pengujian konektivitas web menggunakan daftar uji ini lebih banjur tidak mewakili seluruh internet di Indonesia. Beberapa URL yang termasuk dalam daftar uji ini mungkin telah ketinggalan zaman, tidak terkategori, atau dimasukkan dalam lebih dari satu kategori yang dapat mengakibatkan interpretasi atas pengukuran data yang tidak sesuai atau variatif.

Situs web ini termasuk untuk gerakan pro-kemerdekaan Papua Barat yang salah dikategorikan sebagai terorisme serta situs web perjudian dan konten pertanian yang menyamar sebagai outlet berita yang salah dikategorikan sebagai media berita. Contoh penting lainnya adalah situs hiburan dewasa online *krucil.com*. Situs tersebut, yang saat ini diberi label sebagai e-niaga, berada di beberapa kategori karena menyediakan pornografi dan pendidikan seks, dan juga digunakan untuk mengiklankan pekerjaan seks.

Pengukuran yang dikumpulkan juga dibatasi oleh beberapa ISP yang tercakup. Pada bulan tertentu, hanya 21 hingga 35 ISP yang disertakan dalam data pengukuran dibandingkan dengan 65 ISP yang dicakup untuk seluruh periode pengujian. Perbedaan yang tinggi antara angka-angka ini menunjukkan cakupan ISP yang kurang ideal dari data pengukuran. Mungkin ada ISP Indonesia yang tidak termasuk dalam beberapa pengukuran yang akan mengembalikan pemblokiran yang terkonfirmasi dan dengan demikian membatasi analisis data.

Terlepas dari keterbatasan ini, data pengukuran dari OONI Probe berguna untuk memberikan

indikasi menyeluruh tentang kedalaman dan keluasan sensor internet secara umum di Indonesia. Studi serupa di masa depan dapat mengatasi beberapa keterbatasan ini dengan menerapkan OONI Probe pada lebih banyak perangkat, menjalankan sejumlah pengujian secara berkala, dan memiliki cakupan ISP yang lebih luas di seluruh Indonesia.

Kesimpulan

Sebagaimana yang ditampilkan dalam analisis data pengukuran OONI Probe, studi ini menemukan banyak bukti sensor internet yang luas di Indonesia, terutama situs web yang berkaitan dengan pornografi, perjudian online, alat anonimisasi dan pengelakan, serta komunitas LGBTQ+. Indonesia memiliki pendekatan sensor internet yang semakin ketat dilihat dari bagaimana undang-undang dan kebijakan nasional telah berubah dalam beberapa tahun terakhir. Dengan penerapan kerangka peraturan PSE, beban kepatuhan sensor internet beralih dari ISP ke perantara lainnya termasuk penerbit, host, pemilik platform, pengembang aplikasi, dan sebagainya.

Pendekatan untuk mengatur internet ini dapat mengakibatkan keterasingan dan pencabutan hak lebih lanjut dari komunitas yang terpinggirkan termasuk kelompok LGBTQ+, kelompok agama, dan aktivis pro-kemerdekaan di Indonesia. Situs web, aplikasi, dan layanan berbasis internet lainnya yang melayani komunitas ini di Indonesia harus terus-menerus menilai kembali apakah mereka dapat menanggung kewajiban yang diatur sebagai PSE atau berisiko diblokir di Indonesia. Dengan munculnya kembali Pancasila sebagai wacana politik hipernasionalis, ia juga mengancam keberadaan oposisi politik Indonesia yang sudah lemah dengan menganggap kritik politik sebagai pengkhianat dan, dalam kasus kritik dari politik Islam, penyamaran penyensoran sebagai pemberantasan ekstremisme Islam. Kekuasaan luas yang diberikan kepada pihak berwenang berdasarkan peraturan saat ini menimbulkan kekhawatiran yang sah atas pengawasan negara dan potensi pelanggaran lainnya.

Ekspansi TrustPositif sebagai sistem pemfilteran web terpusat sangat mengkhawatirkan karena hanya akan membuat sensor internet di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien. Regulator jaringan Indonesia sudah berkoordinasi dengan badan pengatur internet non-negara lainnya seperti APJII dan PANDI – pendaftaran nama domain Indonesia – untuk memperluas penggunaan TrustPositif. Dalam mempromosikan INSAN ("internet yang sehat dan aman"), regulator, ISP, dan pemangku kepentingan lainnya harus melakukan pengendalian yang cukup ketat agar setiap pembatasan tidak melanggar hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat. Jika para advokat tidak waspada terhadap perambahan kebebasan berekspresi dan berpendapat secara online, Indonesia akan selangkah lebih dekat untuk memiliki Great Firewall sendiri seperti China. Standar untuk apa yang "sehat" dan "aman" di internet harus selalu ditentang dan diuji terhadap prinsip-prinsip normatif hak asasi manusia tentang legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas.

Lampiran ID-1: ISP yang Diperiksa

ISP yang Diperiksa: Biznet Networks (AS17451), CV Natanetwork Solution (AS138131), Hutchison CP Telecommunications, PT (AS45727), IAIN Walisongo Semarang (AS132638), Indosat Internet Network Provider (AS4761), Kementerian Riset dan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (AS139968), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia - LIPI (AS45292), Linknet-Fastnet ASN (AS23700), Lintas Data Prima, PT (AS45305), Neuviz Net (AS18103), PT Asia Teknologi Solusi (AS56233), PT Bali Towerindo Sentra, Tbk (AS136119), PT Biznet Gio Nusantara (AS133800), PT Centrin Utama (AS9326), PT Citra Jelajah Informatika (AS131717), PT Cloud Hosting Indonesia (AS136052), PT Global Data Akses Persada (AS142368), PT Green Net Indonesia (AS138873), PT iForte Global Internet (AS17995), PT Ikhlas Cipta Teknologi (AS140457), PT Indonesia Comnets Plus (AS9341), PT Inovasi Global Mumpuni (AS55664), PT Jala Lintas Media (AS55685), PT Jaringan VNT Indonesia (AS59278), PT Jaringanku Sarana Nusantara (AS64300), PT Jembatan Citra Nusantara (AS23951), PT Media Sarana Data (AS55666), PT Mega Data Akses (AS142369), PT Mitra Lintas Multimedia (AS136093), PT Mora Telematika Indonesia (AS131111), PT Parsaoran Global Datatrans (AS58495), PT Quantum Tera Network (AS46023), PT Remala Abadi (AS38511), PT Shangkuriang Telekomunikasi Indonesia (AS137310), PT Solnet Indonesia (AS9422), PT Telekomunikasi Indonesia (AS7713), PT Telekomunikasi Indonesia (AS17974), PT Wireless Indonesia Win (AS18004), PT XL Axiata (AS24203), PT XL Axiata Tbk (AS17885), PT XL Axiata Tbk (AS139994), PT Adeaksa Indo Jayatama (AS138123), PT Artha Lintas Data Mandiri (AS137329), PT Cemerlang Multimedia (AS55699), PT Cipta Informatika Cemerlang (AS45295), PT Cyberindo Aditama (AS135478), PT Eka Mas Republik (AS63859), PT Fiber Networks Indonesia (AS58369), PT Hipernet Indodata (AS38758), PT Jinom Network Indonesia (AS138064), PT Jupiter Jala Arta (AS131775), PT Mahameru Media Nusantara (AS138100), PT MNC Kabel Mediacom (AS17670), PT Smartfren Telecom, Tbk (AS133798), PT Telekomunikasi Selular (AS23693), PT Total Info Kharisma (AS9228), PT Transhybrid Communication (AS24534), PT Wanriau Indoxp (AS45294), PT Yasmin Amanah Media (AS139967), Varnion Technology Semesta, PT (AS45287), M247 (AS9009), and Zenlayer Inc (AS21859).

Lampiran I: Glosarium

DNS	<p>DNS merupakan “Sistem Penamaan Domain” dan berfungsi memetakan nama domain ke alamat IP.</p> <p>Domain adalah nama yang umumnya dikaitkan dengan situs web (saat dibuat), sehingga lebih mudah diakses dan diingat. Misalnya, twitter.com adalah domain situs web Twitter.</p> <p>Namun, komputer tidak dapat terhubung ke layanan internet melalui nama domain, tetapi berdasarkan alamat IP: alamat digital setiap layanan di internet. Sama seperti halnya di dunia nyata, Anda memerlukan alamat sebuah rumah (bukan nama rumah itu sendiri) untuk mengunjunginya.</p> <p>Domain Name System (DNS) adalah pihak yang bertanggung jawab untuk mengubah nama domain yang dapat dibaca manusia (seperti ooni.org) menjadi pasangan alamat IP numeriknya (dalam hal ini: 104.198.14.52), sehingga memungkinkan komputer Anda untuk mengakses situs web yang dimaksud.</p>
HTTP	<p>Hypertext Transfer Protocol (HTTP) adalah protokol dasar yang digunakan oleh World Wide Web untuk mentransfer atau bertukar data di internet.</p> <p>Protokol HTTP memungkinkan komunikasi antara klien dan server. Hal tersebut dilakukan dengan menangani permintaan klien untuk terhubung ke server, dan respons server terhadap permintaan klien.</p> <p>Semua situs web menyertakan awalan HTTP (atau HTTPS) (seperti http://example.com/) agar komputer Anda (klien) dapat meminta dan menerima konten situs web (dihosting di server).</p> <p>Transmisi data melalui protokol HTTP tidak terenkripsi.</p>
heuristik	<p>Heuristik memperoleh pemblokiran terkonfirmasi lebih lanjut selain dari yang terdeteksi berdasarkan sidik jari pemblokiran OONI. Keterangan selanjutnya di sini.</p>
ISP	<p>Penyedia Layanan Internet (ISP) adalah organisasi yang menyediakan layanan untuk mengakses dan menggunakan internet.</p> <p>ISP dapat dimiliki oleh negara, komersial, milik masyarakat, nirlaba, atau milik swasta.</p> <p>Vodafone, AT&T, Airtel, dan MTN adalah contoh ISP.</p>
Middle box	<p>Middlebox adalah perangkat jaringan komputer yang mengubah, memeriksa, memfilter, atau memanipulasi lalu lintas untuk tujuan selain penerusan paket.</p> <p>Banyak Internet Service Provider (ISP) di seluruh dunia menggunakan</p>

	<p>middlebox untuk meningkatkan kinerja jaringan, memberi pengguna akses yang lebih cepat ke situs web, dan untuk sejumlah tujuan jaringan lainnya.</p> <p>Kadang-kadang, middlebox juga dipakai untuk menerapkan penyensoran dan/atau pengawasan internet.</p> <p>Aplikasi OONI Probe mencakup dua pengujian yang dirancang untuk mengukur jaringan dengan tujuan mengidentifikasi keberadaan middlebox.</p>
TCP	<p>Transmission Control Protocol (TCP) adalah salah satu protokol utama di internet.</p> <p>Untuk terhubung ke situs web, komputer Anda perlu membuat sambungan TCP ke alamat situs web tersebut.</p> <p>TCP bekerja di atas Protokol Internet (IP), yang menentukan bagaimana menangani komputer pada internet.</p> <p>Saat berkomunikasi dengan mesin melalui protokol TCP, Anda menggunakan pasangan IP dan port, yang terlihat seperti ini: 10.20.1.1:8080.</p> <p>Perbedaan utama antara TCP dan (protokol lain yang sangat populer yang disebut) UDP adalah bahwa TCP memiliki gagasan tentang "koneksi", menjadikannya protokol transport yang "dapat diandalkan".</p>
TLS	<p>Transport Layer Security (TLS) – yang juga dikenal dengan “SSL” – adalah protokol kriptografi yang memungkinkan Anda mempertahankan koneksi terenkripsi yang aman antara komputer Anda dan layanan internet.</p> <p>Saat Anda terhubung ke situs web melalui TLS, alamat situs web akan dimulai dengan HTTPS (seperti https://www.facebook.com/), bukan HTTP.</p>

Glosarium komprehensif terkait OONI dapat diakses di sini: <https://ooni.org/support/glossary/>.

Lampiran II: Metodologi

Data

Data yang dihitung berdasarkan heuristik untuk laporan ini dapat diunduh di sini: <https://github.com/Sinar/imap-data> sedangkan data gabungan dapat diunduh dari OONI Explorer.

Cakupan

Laporan Negara Penyensoran Internet iMAP mencakup temuan pengukuran jaringan yang dikumpulkan melalui Aplikasi Observatory of Network Interference (OONI) OONI Probe yang mengukur pemblokiran situs web, aplikasi pesan instan, alat pengelakan, dan perusakan jaringan. Temuan tersebut menyoroti situs web, aplikasi perpesanan instan, dan alat pengelakan yang dipastikan diblokir, ASN dengan sensor terdeteksi, dan metode gangguan jaringan yang diterapkan. Laporan ini juga memberikan konteks latar belakang lanskap jaringan yang dikombinasikan dengan isu dan peristiwa hukum, sosial dan politik terbaru yang mungkin berdampak pada penerapan sensor internet di negara ini.

Dalam hal garis waktu, laporan iMAP pertama ini mencakup pengukuran yang diperoleh dalam periode enam bulan dari 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022. Negara yang tercakup dalam putaran ini adalah Kamboja, Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Filipina, Thailand, dan Vietnam. India hanya akan disertakan mulai periode pelaporan berikutnya.

Bagaimana pengukuran jaringan dikumpulkan?

Pengukuran jaringan dikumpulkan melalui aplikasi OONI Probe, perangkat lunak gratis yang dikembangkan oleh Open Observatory of Network Interference (OONI). Untuk mempelajari lebih lanjut tentang cara tes OONI Probe bekerja, kunjungi <https://ooni.org/nettest/>.

Peneliti Negara iMAP dan sukarelawan anonim menjalankan aplikasi OONI Probe untuk memeriksa aksesibilitas situs web yang termasuk dalam daftar tes Lab Warga. Peneliti Negara iMAP secara aktif meninjau daftar tes khusus negara untuk memastikan situs web terbaru disertakan dan situs web yang relevan dengan konteks dikategorikan dengan benar, dengan berkonsultasi kepada komunitas lokal dan mitra jaringan hak digital. Kami mengadopsi pendekatan yang diambil oleh Netalitica dalam meninjau daftar tes khusus negara.

Mohon diperhatikan bahwa temuan ini hanya berlaku untuk situs web yang diperiksa dan tidak sepenuhnya mencerminkan semua contoh penyensoran yang mungkin terjadi selama periode pengujian.

Bagaimana pengukuran jaringan dianalisis?

OONI memproses jenis data berikut melalui data pipeline-nya:

Kode negara

OONI secara default mengumpulkan kode yang sesuai dengan negara tempat pengguna

menjalankan tes OONI Probe, dengan mencarinya secara otomatis berdasarkan alamat IP pengguna melalui database ASN mereka, database MaxMind GeoIP.

Nomor Sistem Otonom (ASN)

OONI secara default mengumpulkan Autonomous System Number (ASN) dari jaringan yang digunakan untuk menjalankan aplikasi OONI Probe sehingga mengungkapkan penyedia jaringan pengguna.

Tanggal dan waktu pengukuran

OONI secara default akan mengumpulkan waktu dan tanggal saat pengujian dijalankan untuk mengevaluasi saat gangguan jaringan terjadi dan untuk memungkinkan perbandingan sepanjang waktu. UTC digunakan sebagai zona waktu standar dalam informasi waktu dan tanggal. Selain itu, grafik yang dibuat di OONI MAT akan mengecualikan pengukuran pada hari terakhir secara default.

Kategori

32 kategori situs web didasarkan pada daftar tes Citizenlab: <https://github.com/citizenlab/test-lists>. Karena tidak semua situs web yang diuji di OONI ada dalam daftar pengujian ini, maka situs web ini akan memiliki kategori yang tidak terklasifikasi.

Deskripsi Kategori	Code	Deskripsi
Alkohol & Narkoba	ALDR	Situs yang ditujukan untuk penggunaan, kepemilikan, dan penjualan obat dan alkohol terlepas dari legalitas setempat.
Agama	REL	Situs yang ditujukan untuk membahas isu agama, baik yang mendukung dan kritis, termasuk diskusi kelompok agama minoritas.
Pornografi	PORN	Pornografi hard-core dan soft-core.
Pakaian Provokatif	PROV	Situs web yang menampilkan pakaian provokatif dan menggambarkan wanita secara seksual, dengan pakaian minim.
Kritik Politik	POLR	Konten yang menawarkan sudut pandang politik kritis. Termasuk penulis kritis dan blogger, serta organisasi politik oposisi. Meliputi konten prodemokrasi, konten antikorupsi serta konten menyerukan perubahan kepemimpinan, isu pemerintahan, reformasi hukum, dll.

Deskripsi Kategori	Code	Deskripsi
Isu Hak Asasi Manusia	HUMR	Situs yang didedikasikan untuk membahas isu hak asasi manusia dalam berbagai jenis. Termasuk hak perempuan dan hak grup etnis minoritas.
Lingkungan	ENV	Polusi, perjanjian lingkungan internasional, penggundulan hutan, keadilan lingkungan, bencana, dan lain-lain.
Terorisme dan Militan	MILX	Situs yang mendorong terorisme, militan kekerasan, atau gerakan separatis.
Ujaran Kebencian	HATE	Konten yang merendahkan kelompok atau orang tertentu berdasarkan ras, jenis kelamin, seksualitas, atau karakteristik lainnya
Media Berita	NEWS	Kategori ini mencakup outlet berita utama (BBC, CNN, dll.) serta outlet berita regional dan media independen.
Pendidikan Seks	XED	Meliputi kontrasepsi, pantangan, PMS, seksualitas sehat, kehamilan remaja, pencegahan perkosaan, aborsi, hak seksual, dan layanan kesehatan seksual.
Kesehatan Masyarakat	PUBH	HIV, SARS, flu burung, pusat pengendalian penyakit, Organisasi Kesehatan Dunia, dan lain-lain
Perjudian	GMB	Situs perjudian online. Termasuk permainan kasino, taruhan olahraga, dll.
Fitur anonimisasi dan pengelakan	ANON	Situs yang menyediakan alat yang digunakan untuk anonimitas, pengelabuan, layanan proksi, dan enkripsi.
Kecan Online	DATE	Layanan kencan online yang dapat digunakan untuk bertemu orang, memposting profil, mengobrol, dll
Jejaring Sosial	GRP	Alat dan platform jejaring sosial.
LGBT	LGBT	Berbagai masalah queer gay-lesbian-biseksual-transgender. (Tidak termasuk pornografi)
Berbagi file	FILE	Situs dan alat yang digunakan untuk membagikan file, termasuk penyimpanan file berbasis cloud, torrent dan alat pembagian file P2P.

Deskripsi Kategori	Code	Deskripsi
Alat Hacking	HACK	Situs yang didedikasikan untuk keamanan komputer, termasuk berita dan alat. Termasuk konten berbahaya dan tidak berbahaya.
Alat Komunikasi	COMT	Situs dan alat untuk komunikasi individu dan kelompok. Termasuk aplikasi webmail, VoIP, pesan instan, obrolan, dan pesan seluler.
Media sharing	MMED	Platform berbagi video, audio, atau foto.
Platform Hosting dan Blogging	HOST	Layanan hosting web, blogging dan platform publikasi online lainnya.
Mesin Pencari	SRCH	Mesin pencari dan portal.
Game	GAME	Game online dan platform game, tidak termasuk situs perjudian.
Budaya	CULTR	Konten terkait hiburan, sejarah, literatur, musik, film, buku, satir, dan humor
Ekonomi	ECON	Topik-topik yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi secara umum dan kemiskinan, keagenan dan peluang pendanaan
Pemerintah	GOVT	Situs web yang dikelola pemerintah, termasuk situs militer.
E-niaga	COMM	Situs web layanan dan produk komersial.
Konten kontrol	CTRL	Konten yang tidak membahayakan dan tidak merugikan digunakan sebagai kontrol.
Organisasi Antarpemerintah	IGO	Situs web organisasi antar pemerintah seperti PBB.
Konten lain-lain	MISC	Situs yang tidak masuk ke kategori mana pun (Hal-hal berbau XXX di sini perlu dikategorisasikan)

Alamat IP dan informasi lainnya

OONI tidak mengumpulkan atau menyimpan alamat IP pengguna dengan sengaja. OONI mengambil tindakan untuk menghapusnya dari pengukuran yang dikumpulkan guna melindungi penggunanya dari potensi risiko. Namun, mungkin ada kasus alamat IP pengguna dan informasi identitas pribadi lainnya yang berpotensi dikumpulkan secara tidak sengaja, jika informasi tersebut disertakan dalam header HTTP atau metadata pengukuran lainnya. Misalnya, hal ini dapat terjadi jika situs web yang diuji menyertakan teknologi pelacakan atau konten khusus berdasarkan lokasi jaringan pengguna.

Pengukuran jaringan

Jenis pengukuran jaringan yang dikumpulkan OONI bergantung pada jenis pengujian yang dijalankan. Spesifikasi tentang pengujian OONI dapat dilihat melalui repositori gitnya, dan detail pengukuran jaringan yang dikumpulkan dapat dilihat melalui OONI Explorer atau API pengukuran OONI.

Untuk mendapatkan makna dari pengukuran yang dikumpulkan, OONI memproses tipe data yang disebutkan di atas untuk menjawab pertanyaan berikut:

- Jenis tes OONI apa yang dijalankan?
- Di negara mana tes tersebut dijalankan?
- Di jaringan mana tes tersebut dijalankan?
- Kapan tes dijalankan?
- Gangguan jaringan seperti apa yang terjadi?
- Di negara mana saja gangguan jaringan terjadi?
- Di jaringan mana gangguan jaringan terjadi?
- Kapan gangguan jaringan terjadi?
- Bagaimana gangguan jaringan terjadi?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pipeline OONI dirancang untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan memproses data pengukuran jaringan untuk mengaktifkan hal berikut:

- Mengatribusikan pengukuran ke negara tertentu.
- Mengatribusikan pengukuran ke negara tertentu.
- Membedakan pengukuran berdasarkan pengujian khusus yang dijalankan untuk koleksi mereka.
- Membedakan antara pengukuran "normal" dan "anomali" (yang terakhir menunjukkan kemungkinan adanya bentuk gangguan jaringan).
- Mengidentifikasi jenis gangguan jaringan berdasarkan sekumpulan heuristik untuk perusakan DNS, pemblokiran TCP/IP, dan pemblokiran HTTP.
- Mengidentifikasi halaman blokir berdasarkan kumpulan heuristik untuk pemblokiran HTTP.
- Mengidentifikasi keberadaan "kotak tengah" dalam jaringan yang diuji.

Menurut OONI, positif palsu dapat terjadi dalam data yang diproses karena beberapa alasan. Resolver DNS (dioperasikan oleh Google atau ISP lokal) sering memberi pengguna alamat IP yang paling dekat dengan mereka secara geografis. Meskipun tampak seperti kasus perusakan DNS, hal ini sebenarnya dilakukan agar pengguna memiliki akses yang lebih cepat

ke situs web. Demikian pula, positif palsu dapat muncul saat situs web yang diuji menyajikan konten yang berbeda tergantung pada negara tempat pengguna terhubung, atau ketika situs web kembali gagal meskipun tidak dirusak.

Selain itu, pengukuran yang menunjukkan pemblokiran HTTP atau TCP/IP mungkin sebenarnya disebabkan oleh kegagalan HTTP atau TCP/IP sementara, dan mungkin tidak secara meyakinkan menjadi tanda gangguan jaringan. Oleh karena itu, penting untuk menguji kumpulan situs web yang sama sepanjang waktu dan untuk menghubungkan data secara silang, sebelum mencapai kesimpulan apakah situs web benar-benar diblokir.

Karena halaman blokir berbeda pada tiap negara dan bahkan tiap jaringan, cukup sulit untuk mengidentifikasinya secara akurat. OONI menggunakan serangkaian heuristik untuk mencoba menebak jika halaman yang dimaksud berbeda dengan kontrol yang seharusnya, tetapi heuristik ini sering kali menghasilkan positif palsu. Oleh karena itu, OONI hanya menunjukkan jika ada pemblokiran terkonfirmasi saat suatu halaman blokir terdeteksi.

Setelah mendapatkan pengukuran jaringan yang cukup banyak, OONI terus mengembangkan heuristik analisis datanya, berdasarkan upayanya untuk mengidentifikasi peristiwa penyensoran secara akurat.

Daftar uji khusus negara lengkap yang berisi situs web terblokir terkonfirmasi di Myanmar, Kamboja, Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam dapat dilihat di sini: <https://github.com/citizenlab/test-lists>.

Dikonfirmasi vs Heuristik

Pengukuran OONI terkonfirmasi didasarkan pada halaman pemblokiran dengan sidik jari yang direkam di sini <https://github.com/ooni/blocking-fingerprints>.

Karena itu, heuristik di bawah ini dilakukan berdasarkan pengukuran kasar di semua negara sesuai iMAP untuk mengonfirmasi pemblokiran lebih lanjut.

Pertama, alamat IP dengan lebih dari 10 domain diidentifikasi. Kemudian masing-masing alamat IP diperiksa sebagai berikut:

Apakah IP yang dimaksud mengarah ke pemblokiran pemerintah?				
Ya	Tidak, waktu halaman sudah habis atau menampilkan halaman Content Delivery Network (CDN).			
↓	↓			
Pemblokiran terkonfirmasi	Informasi seputar IP apa yang bisa kita dapatkan dengan melakukan pencarian whois?			
↓	ISP Lokal	CDN / IP Pribadi		
	↓	↓		
	Pemblokiran terkonfirmasi	Apakah kami mendapatkan sertifikat TLS yang valid untuk salah satu domain yang dimaksud saat melakukan handshake TLS dan menentukan SNI		
		Ya	Tidak, ditemukan sidik jari pemblokiran.	Tidak, waktu sudah habis
↓		↓	↓	
Positif palsu		Pemblokiran terkonfirmasi	Pengukuran sampel dianalisis di OONI Explorer.	

Saat pemblokiran ditentukan, domain apa pun yang dialihkan ke alamat IP ini akan ditandai sebagai 'dns.confirmed'.

Kedua, judul dan isi HTTP dianalisis untuk menentukan halaman yang diblokir. Contoh ini menunjukkan bahwa HTTP mengembalikan teks 'URL telah diblokir menurut instruksi DoT sesuai dengan perintah dari Pengadilan'. Domain apa pun yang dialihkan ke judul dan isi HTTP ini akan ditandai sebagai 'http.confirmed'.

Akibatnya, kecocokan palsu dihapus dan lebih banyak konfirmasi pemblokiran yang diperoleh termasuk negara-negara seperti Kamboja, Vietnam, dan Filipina yang tidak memiliki konfirmasi pemblokiran sidik jari di OONI (jaringan observasi global untuk mendeteksi penyensoran).

Dalam kasus Hong Kong, hasil heuristik menunjukkan sensor eksternal dari luar negeri bukan sensor lokal. Dengan demikian, peneliti lokal telah menganalisis pengukuran OONI secara manual untuk mengidentifikasi pemblokiran yang dikonfirmasi. Domain yang diidentifikasi didasarkan pada waktu habis.